

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Secara geografis, Laut China Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik, wilayahnya membentang dari sebagian Singapura dan Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan. Laut ini memiliki luas sekitar 3,5 juta km<sup>2</sup> dan merupakan wilayah perairan terluas atau terluas kedua setelah kelima Samudera (Harahap, 2016, hlm. 2). Sedangkan secara topografinya, Laut China Selatan ini memiliki luas area sampai 648.000 mil<sup>2</sup> atau setara dengan 3.000.000 km<sup>2</sup> di Samudera Pasifik yang terdiri dari 1.000.000 km<sup>2</sup> landas kontinental yang kedalamannya hingga 200 m dan 2.000.000 km<sup>2</sup> kawasan permukaan laut yang kedalamannya melebihi 200 m (Nguyen, 2006, hlm. 89).

Laut China Selatan merupakan “laut setengah tertutup” (*semi-enclosed sea*) yang berbatasan dengan China dan Taiwan di sebelah utara; Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia Barat di sebelah barat ke selatan; Filipina di sebelah timur; Indonesia dan Malaysia Timur di sebelah selatan. Terdapat beberapa gugus kepulauan yang tersebar yaitu, gugus Kepulauan Pratas, dan gugus Kepulauan Paracel, gugus Kepulauan Spratly serta terdapat gugusan karang Macclesfield Bank (Usman dan Sukma, 1997, hlm. 1-2). Letaknya yang dikelilingi oleh berbagai negara karena merupakan laut setengah tertutup berakibat pada kesulitan penentuan batas wilayah laut dari masing-masing negara, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan wilayah Laut China Selatan tersebut menjadi sengketa beberapa negara yang kemudian berujung kepada konflik.

Menurut Nainggolan (2013, hlm. 7), sengketa kepemilikan atau kedaulatan teritorial di Laut China Selatan sesungguhnya merujuk pada kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan yaitu Paracel dan Spratly. Kepulauan Paracel dan Spratly kemungkinan memiliki cadangan besar sumber daya alam di sekelilingnya. China memperkirakan cadangan minyak yang terkandung sebanyak 213 miliar barel atau sepuluh kali lipat dari cadangan milik Amerika Serikat (Wiranto, 2016, hlm. 42). Sebenarnya sumber-sumber kekayaan mineral yang diyakini terdapat di Laut China Selatan ini masih menjadi

perdebatan, namun demikian hal tersebut tidak mengurangi rasa optimis beberapa pihak yang turut meyakini keberadaan cadangan sumber daya alam berupa mineral yang banyak terkandung di wilayah Kepulauan Paracel dan Spratly. Usman dan Sukma (1997, hlm. 23), bahkan menyebutkan kandungan-kandungan mineral yang termuat di kawasan tersebut seperti *kobalt*, tembaga, timah, *fosfat*, *nodul mangan*, terutama gas serta minyak.

Sumber daya alam yang terdapat di Laut China Selatan bukan hanya sebatas minyak bumi dan bahan mineral lainnya saja, sumber daya laut yang dihasilkan juga sangat melimpah, laut ini terkenal dengan berbagai macam jenis ikan. Menurut Polomka (1978, hlm. 50), penangkapan ikan di perairan Laut China Selatan pada akhir dasawarsa 1970-an meliputi 5 juta ton per tahun, dan akan mengalami peningkatan sekitar 3 juta ton dalam satu tahun yang bernilai kurang lebih USD 6.452 juta. Data ini menunjukkan bahwa kekayaan ikan di perairan Laut China Selatan akan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi negara-negara di sekitarnya.

Tidak berhenti sampai di situ saja, daya tarik Laut China Selatan tersebut juga terdapat pada fungsinya sebagai jalur perdagangan. Jepang 80% impor minyaknya diangkut melalui jalur kawasan Laut China Selatan. Amerika juga menggunakan laut ini untuk mendukung mobilitas pasukan militernya dalam melancarkan dominasi globalnya (Prasetyo, 2016, hlm. 77). Hal tersebut yang membuat negara-negara maju menjadikan stabilitas kawasan Laut China Selatan sebagai prioritas dalam aktivitas politik luar negerinya. Bahkan menurut Cobus dalam portal berita *VOA News* menyebutkan bahwa sepertiga lalu lintas maritim global dilakukan di Laut China Selatan dan berpengaruh terhadap perdagangan internasional yang mampu menghasilkan USD 5 triliun. Lebih lanjut dijelaskan oleh Usman dan Sukma (1997) mengenai peran Laut China Selatan sebagai jalur pelayaran yang memiliki arti penting bagi perdagangan regional dan internasional, sebagai berikut :

Dalam lingkup regional, Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran kapal-kapal niaga dan tanker-tanker minyak yang menghubungkan Korea, Jepang, China, dan Rusia ke negara-negara Asia Tenggara dan sebaliknya. Perairan ini juga merupakan jalur pelayaran bagi perdagangan antar negara Asia Tenggara, misalnya dari Filipina ke Malaysia, Singapura,

## **R. Wildan Pratama Indra Kusumah, 2018**

*DINAMIKA HUBUNGAN ASEAN DENGAN CHINA DALAM UPAYA  
PENYELESAIAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN TAHUN 1992-2011*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

Indonesia, dan sebaliknya. Dalam lingkup internasional, perairan Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan Asia Timur dengan Eropa, Afrika, dan Timur Tengah melalui Selat Malaka. Selain itu dilihat dari sudut strategis dan keamanan, kawasan Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran kapal-kapal perang bagi negara-negara besar. Karena lokasinya yang diapit oleh dua samudera, jalur pelayaran Laut China Selatan sangat strategis bagi pengintaian (*surveillance*), pencegahan kapal-kapal perang (*interdiction*), dan bagi manuver Angkatan Laut untuk mengganggu lalu lintas kapal-kapal perang. (hlm. 25)

Dari beberapa faktor yang telah disebutkan maka tidak salah apabila Laut China Selatan menjadi kawasan yang sangat diinginkan oleh berbagai macam pihak. Potensi-potensi yang terdapat pada kawasan tersebut menjadi incaran banyak negara yang kemudian menimbulkan sengketa yang kita kenal sekarang sebagai konflik Laut China Selatan.

Akar dari konflik Laut China Selatan dimulai ketika klaim pertama kali pada tahun 1947 oleh China yang secara sepihak mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan dengan menerbitkan peta yang memberi tanda sembilan garis putus-putus di seputar wilayah itu (Akmal dan Pazli, 2016, hlm. 2). Garis tersebut tidak memiliki batas-batas yang jelas karena tidak mempunyai koordinat dan definisi yang jelas, sehingga tuntutan tersebut dianggap tidak jelas apakah tuntutan tersebut menghendaki penguasaan terhadap pulau-pulau yang terdapat di dalam garis atau seluruh laut yang termasuk di dalamnya. Dalam perkembangannya, klaim tersebut memunculkan banyak reaksi dari beberapa negara yang juga merasa berhak atas kawasan tersebut. Setidaknya ada enam negara yang berselisih di wilayah Laut China Selatan. Wilayah tersebut di antaranya adalah China, Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Setiap negara memiliki pandangannya masing-masing yang berbeda terkait kepemilikan atas kawasan tersebut. Klaim yang dilakukan oleh China, Taiwan, dan Vietnam didasarkan pada sejarah penemuan dan pendudukan pulau-pulau di gugusan Kepulauan Spratly dan Paracel, Filipina didasarkan pada kelanjutan klaim landas kontinen, sedangkan

## **R. Wildan Pratama Indra Kusumah, 2018**

*DINAMIKA HUBUNGAN ASEAN DENGAN CHINA DALAM UPAYA  
PENYELESAIAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN TAHUN 1992-2011*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

Malaysia dan Brunei mengklaim perpanjangan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan landas kontinen Indonesia (Wiranto, 2016, hlm. 8).

Klaim tersebut selanjutnya memunculkan tuntutan yang kemudian diperkuat melalui tindakan-tindakan seperti mengibarkan bendera, menduduki dan membangun benteng-benteng atau bangunan, menerbitkan peta baru, menerbitkan dokumen-dokumen sejarah yang berkaitan dengan tuntutan, dan penempatan pasukan militer. Sebenarnya negara-negara ASEAN yang mengklaim wilayah tersebut telah mendasarkan klaimnya pada aturan hukum internasional yang tercantum dalam *United Nation Convention on Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, namun jika dilihat dari naskah lengkap konvensi tersebut pada bagian aturan mengenai laut setengah tertutup hanya memuat poin sederhana “*States bordering an enclosed or semi-enclosed sea should co-operate with each other in the exercise of their right and in the performance of their duties under this Convention. To this end they shall endeavor, directly or through an appropriate regional organization*” (Soebroto, Sunardi dan Wahyono, 1983, hlm. 145). Artinya bahwa negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup harus mengadakan kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajibannya atas laut tersebut. Aturan yang tidak terlalu mengikat dan tidak terlalu tegas tersebut membuat masing-masing negara yang merasa memiliki hak terhadap kawasan Laut China Selatan tetap pada pendiriannya sehingga konflik terus berlanjut.

Konflik Laut China Selatan ini terus berlarut-larut dan tidak terselesaikan. Muncul kekhawatiran konflik ini akan meluas menjadi konflik keamanan regional dan menimbulkan potensi ancaman seperti yang diungkapkan oleh Riawan dan Kaya (1993, hlm. 42), bukan mustahil China (sebagai negara yang memiliki kekuatan militer paling potensial, jika dibandingkan dengan Vietnam sekarang) akan menggunakan segala sarana untuk menghadapi segala hal yang terjadi dalam menyelesaikan kasus di Spratly ini. Dan bila hal ini terjadi, akan ada ancaman dari China bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kawasan negara-negara Asia Tenggara sendiri sebenarnya memang merupakan sebuah kawasan yang memiliki tingkat keberagaman atau heterogenitas yang tinggi baik dari segi sejarah, budaya, politik dan ekonomi. Sehingga kawasan negara-negara Asia Tenggara seringkali dipandang sebagai kawasan yang sangat rentan terhadap konflik dengan

**R. Wildan Pratama Indra Kusumah, 2018**

*DINAMIKA HUBUNGAN ASEAN DENGAN CHINA DALAM UPAYA  
PENYELESAIAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN TAHUN 1992-2011*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

keseimbangan kawasan yang tergolong rapuh, laju perekonomian setiap negara yang bervariasi dari berkembang sampai dengan maju, serta keberadaan beberapa kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, China dan Jepang membuat persaingan politik dan ekonomi di kawasan ini menjadi satu hal yang tidak terhindarkan. Selain itu, isu keamanan tradisional yang berkaitan dengan konflik perbatasan wilayah atau konflik teritorial yang terjadi di wilayah perairan di beberapa *sub-region* di kawasan Asia Tenggara telah menjadi isu utama yang menjadikan kawasan ini mengalami ketidakstabilan berkepanjangan (Veronika, 2012, hlm 2).

ASEAN sebagai organisasi regional negara-negara Asia Tenggara merasa memiliki kewajiban untuk menjembatani negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan ini. Dalam deklarasi ASEAN dinyatakan bahwa maksud dan tujuan ASEAN salah satunya adalah “Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dan menjunjung tinggi keadilan dan tertib hukum dalam hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara dan berpegang pada asas Piagam PBB” (Kementerian Komunikasi dan Informasi Teknologi, 2014, hlm. 1). Sedikitnya empat negara ASEAN yang terlibat dalam sengketa ini yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Tentunya ASEAN memiliki kewajiban untuk membela dan melindungi negara-negara anggotanya, apalagi perbedaan klaim dan pendapat China dan beberapa negara ASEAN tersebut menjurus kepada penggunaan kekuatan militer, namun di sisi lain hubungan ekonomi antara ASEAN dan China sangat dekat dan strategis (Raharjo, 2014, hlm. 62). Hal tersebut dibenarkan oleh Lijun (2007, hlm. 11), mengatakan bahwa “*China-ASEAN trade has expanded fast, with an average growth rate of 21 per cent from 1991 to 2005, with ASEAN becoming China’s fourth biggest trade partner, and China the fifth biggest trade partner of ASEAN in November 2002*”. Dilengkapi oleh Storey (2008, hlm. 13), “*In 2008-2009 China will continue to court ASEAN as an organization and the individual members on a bilateral basis in order to advance its economic, political and strategic interest in region*”.

ASEAN menyadari posisinya sebagai organisasi regional yang berfungsi untuk menciptakan dan menjamin keamanan dan kestabilan di wilayah Asia Tenggara, yang juga membutuhkan China dalam

### **R. Wildan Pratama Indra Kusumah, 2018**

**DINAMIKA HUBUNGAN ASEAN DENGAN CHINA DALAM UPAYA  
PENYELESAIAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN TAHUN 1992-2011**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

kerjasama ekonominya, sehingga dalam upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan, ASEAN mengambil jalan damai dengan menggunakan diplomasi melalui berbagai cara salah satunya adalah melalui ARF (*ASEAN Regional Forum*). ARF sebagai forum untuk saling tukar pandangan dan informasi bagi negara-negara Asia-Pasifik mengenai masalah-masalah politik dan keamanan, baik regional maupun internasional. Sasaran yang hendak dicapai melalui ARF adalah mendorong saling percaya (*confidence building measures*) melalui transparansi dan mencegah kemungkinan timbulnya ketegangan maupun konflik di kawasan Asia Pasifik. ARF diharapkan menjadi wadah dialog untuk menjembatani sengketa teritorial di Laut China Selatan yang berfungsi untuk menampung isu-isu politik dan keamanan yang menjadi kepedulian dan kepentingan umum. Selain itu diharapkan berkontribusi secara signifikan dalam upaya menuju pembangunan kepercayaan dan diplomasi preventif di wilayah Asia-Pasifik sebagai pendekatan strategis untuk resolusi konflik (Irada, 2013, hlm. 8).

Selain itu dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN mengeluarkan *Declaration on the South China Sea* pada tahun 1992 yang mengawali kontribusi ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan. Sepuluh tahun kemudian tepatnya tahun 2002, ASEAN dan China mengeluarkan *Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea* (DOC) yang berisi komitmen dari negara anggota ASEAN dan China untuk mematuhi hukum internasional, menghormati *freedom of navigation* di Laut China Selatan, menyelesaikan sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik. DOC menjadi pedoman bertindak agar terciptanya perdamaian dan stabilitas di wilayah sengketa dengan semangat dan saling percaya antara anggota ASEAN dengan China. Sampai pada tahun 2011 ASEAN berhasil menyepakati *Guidelines for the Implementation of the DOC* yang membuka kesempatan dimulainya pembahasan pembentukan *Code of Conduct in the South China Sea* (COC) yang akan berfungsi sebagai sebuah mekanisme operasional pencegahan konflik dan bertujuan untuk mengatur tata prilaku negara secara efektif (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2013).

## **R. Wildan Pratama Indra Kusumah, 2018**

*DINAMIKA HUBUNGAN ASEAN DENGAN CHINA DALAM UPAYA  
PENYELESAIAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN TAHUN 1992-2011*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

Dalam perjalanan dari tahun 1992 hingga 2011 tidaklah mudah, hubungan antara ASEAN dengan China menghadapi banyak rintangan. Meskipun sejak 1992 telah terdapat suatu deklarasi yang mengatur tata prilaku negara-negara terkait, namun hal tersebut tidak menjamin bahwa aturan tersebut dilaksanakan secara utuh. Muncul beberapa pelanggaran yang dilakukan baik dari pihak negara anggota ASEAN ataupun China, yang menyebabkan hubungan di antara keduanya mengalami pasang surut yang dinamis. Laut China Selatan merupakan kawasan yang memiliki nilai sangat strategis, ekonomis dan politis. Laut China Selatan merupakan “jantung” Asia Tenggara, semakin menjadi arena konflik antar negara Asia sendiri, maupun antara negara luar kawasan, dalam rangka sengketa timur-barat. Bahkan kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat dan Uni Soviet di kawasan ini, menambah kompleksnya masalah keamanan regional (Habib, 1988, hlm. 16).

Konflik yang telah berlangsung cukup lama terus berlanjut tanpa menemui penyelesaian hingga saat ini. ASEAN sebagai organisasi perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara berupaya dalam menjaga perdamaian regional yang merupakan tujuan didirikannya ASEAN, posisi China sebagai partner ekonomi dari ASEAN yang juga memiliki kepentingan di Laut China Selatan, ditambah hadirnya “aktor-aktor” luar yang juga memiliki kepentingannya masing-masing menambah kompleks konflik yang terjadi di kawasan tersebut. Dengan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengkaji bahasan dengan judul “*Dinamika Hubungan ASEAN dengan China dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan tahun 1992-2011*”.

Dalam pembahasan akan ditemui istilah China yang secara umum merujuk kepada dua negara yang memiliki nama China yaitu, Republik Rakyat China dan Republik China yang lebih dikenal sebagai Taiwan. Namun dalam kajian penelitian ini, istilah China yang dimaksud adalah Republik Rakyat China. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, yang menjadi pokok bahasan utama adalah dinamika hubungan yang terjadi antara ASEAN dengan Republik Rakyat China. Selain itu, meskipun dalam sudut pandang Indonesia penyebutan Laut China Selatan lebih dikenal dengan Laut Natuna Utara, namun dalam pembahasan kali ini penulis memutuskan untuk menggunakan istilah Laut China Selatan agar lebih *universal*.

**R. Wildan Pratama Indra Kusumah, 2018**

*DINAMIKA HUBUNGAN ASEAN DENGAN CHINA DALAM UPAYA  
PENYELESAIAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN TAHUN 1992-2011*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana Dinamika Hubungan ASEAN dengan China dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan tahun 1992-2011?*”. Untuk memfokuskan kajian penelitian ini, rumusan masalah tersebut disusun dalam beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum hubungan ASEAN dengan China dalam konflik Laut China Selatan?
2. Bagaimana pendekatan yang dilakukan ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan tahun 1992-2011?
3. Bagaimana problematika yang dihadapi ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan tahun 1992-2011?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian Karya Ilmiah dengan judul “*Dinamika Hubungan ASEAN dengan China dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan tahun 1992-2011*” memiliki tujuan yang ingin penulis capai. Adapun tujuan yang ingin penulis capai adalah :

1. Mendeskripsikan gambaran umum hubungan antara ASEAN dengan China dalam konflik Laut China Selatan.
2. Menjelaskan pendekatan yang dilakukan ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan tahun 1992-2011.
3. Menganalisis problematika yang dihadapi ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan tahun 1992-2011.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan Karya Ilmiah dengan judul “*Dinamika Hubungan ASEAN dengan China dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan tahun 1992-2011*” penulis bedakan menjadi secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Secara teoritis, karya ilmiah ini diharapkan dapat menjalankan fungsi edukatifnya, yaitu memberikan pembelajaran mengenai peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan peran ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik yang melibatkan negara-negara anggotanya di Laut China Selatan.

## R. Wildan Pratama Indra Kusumah, 2018

*DINAMIKA HUBUNGAN ASEAN DENGAN CHINA DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN TAHUN 1992-2011*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu



2. Secara praktis, karya ilmiah ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai pelengkap tulisan sejarah yang berkaitan dengan organisasi regional dan global yang menjadi materi pelajaran Sejarah (Peminatan) kelas XII kurikulum 2013 dalam Kompetensi Dasar “3.2 Mengevaluasi Sejarah Organisasi Global dan Regional di antaranya : GNB, ASEAN, OKI, APEC, OPEC, MEE, GATT, WTO, NAFTA, dan CAFTA”.

### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis berdasarkan buku Pedoman Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2016, adalah :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis berusaha memaparkan latar belakang penelitian yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi. Latar belakang penelitian yang diuraikan oleh penulis mencakup letak geografis Laut China Selatan disertai dengan sumber daya yang terkandung di dalamnya, munculnya ketegangan antara China dengan beberapa negara Asia Tenggara di Laut China Selatan, ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara, serta alasan mengapa penulis memilih kajian penelitian ini. Untuk memperinci serta membatasi masalah agar tidak terlalu meluas maka dicantumkan rumusan dan batasan masalah sehingga dapat dikaji secara khusus dalam penulisan ini. Pada akhir bab ini juga dimuat mengenai tujuan, manfaat hingga sistematika penulisan skripsi yang menjadi kerangka dan pedoman penulisan karya ilmiah ini.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini penulis berusaha memaparkan hasil studi kepustakaan dari beberapa literatur yang telah penulis baca, yang menjadi pegangan dalam penulisan skripsi ini. Hasil studi kepustakaan tersebut mencakup teori-teori, konsep-konsep serta penelitian terdahulu yang disesuaikan dengan variabel penelitian.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini penulis berusaha memaparkan langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian. Dimulai dari pemilihan metode dan teknik penelitian yang sesuai dengan kajian, hingga tahap penulisan karya ilmiah. Metode digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

### **R. Wildan Pratama Indra Kusumah, 2018**

*DINAMIKA HUBUNGAN ASEAN DENGAN CHINA DALAM UPAYA  
PENYELESAIAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN TAHUN 1992-2011*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

Seluruh tahapan-tahapan tersebut disampaikan secara rinci sesuai dengan keadaan yang penulis temui di lapangan.

Bab IV Pembahasan, dalam bab ini penulis berusaha memaparkan jawaban-jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang dinamika hubungan ASEAN dengan China dalam upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan tahun 1992-2011. Penulis membagi pembahasan tersebut ke dalam beberapa pokok bahasan yaitu, gambaran umum hubungan antara ASEAN dengan China, pendekatan yang dilakukan kepada China oleh ASEAN sebagai organisasi regional yang anggota-anggotanya terlibat dalam sengketa di Laut China Selatan, problematika yang dihadapi dalam upaya menyelesaikan konflik Laut China Selatan.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, pada bab ini penulis berusaha memaparkan kesimpulan menyeluruh dari pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil analisis penulis terkait kajian dinamika hubungan ASEAN dengan China dalam upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan tahun 1992-2011. Pada bab ini juga terdapat rekomendasi penulis untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

**R. Wildan Pratama Indra Kusumah, 2018**

*DINAMIKA HUBUNGAN ASEAN DENGAN CHINA DALAM UPAYA  
PENYELESAIAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN TAHUN 1992-2011*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu